

## **Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Beasiswa Pendidikan (KIP) terhadap Tingkat Kelulusan Mahasiswa di Universitas Swasta Kota Jambi**

Pratiwi Indah Sari<sup>\*1</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Muhammad Sabandi<sup>3</sup>, Ati Sadiyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Economic Education Program Study, FKIP, UNS, Surakarta

\*Correspondence email: [pratiwi.indah.sari@student.uns.ac.id](mailto:pratiwi.indah.sari@student.uns.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap tingkat kelulusan mahasiswa di Universitas Swasta Kota Jambi. Fokus utama penelitian adalah bagaimana akses pembiayaan pendidikan melalui KIP mempengaruhi capaian akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada *multi-perspective analysis* terhadap kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima KIP, dosen pembimbing akademik, serta staf bagian kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kuliah memiliki kontribusi nyata dalam membuka akses pendidikan tinggi, tetapi efektivitasnya dalam mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu bergantung pada dukungan kebijakan lanjutan di tingkat institusi. Maka, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan beasiswa diintegrasikan dengan program pembinaan akademik berkelanjutan, penguatan layanan konseling, serta monitoring kemajuan studi secara berkala.

**Kata Kunci:** Beasiswa Pendidikan; KIP; Tingkat Kelulusan Mahasiswa.

**Abstract.** This study aims to analyze the impact of government policy through the Smart Indonesia Card (KIP) program on student graduation rates at a private university in Jambi City. The main focus of the study is how access to educational funding through KIP affects academic achievement. The research method used is a descriptive qualitative approach, emphasizing a multi-perspective analysis of public policy. Data were collected through in-depth interviews with KIP recipient students, academic advisors, and student affairs staff. The results indicate that KIP has a significant contribution to opening access to higher education, but its effectiveness in encouraging students to complete their studies on time depends on continued policy support at the institutional level. Therefore, this study recommends that the scholarship policy be integrated with a continuous academic development program, strengthening counseling services, and regular monitoring of study progress.

**Keywords:** Education Scholarship, KIP, Student Graduation Rate.

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks ekonomi makro, model pertumbuhan Ramsey dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana investasi dalam akumulasi pengetahuan, termasuk melalui pendidikan, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Phelps (1966b) dan Shell (1966) menekankan pentingnya investasi pada penelitian dan pengembangan sebagai penggerak utama produktivitas ekonomi. Sementara itu, dalam kerangka model pertumbuhan endogen, seperti yang dikemukakan oleh Romer (2012), pengetahuan diposisikan sebagai komponen fundamental yang meningkatkan produktivitas total faktor melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan kontribusi melalui peningkatan keterampilan, kapasitas inovasi, dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah melalui pemberian beasiswa pendidikan seperti KIP tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok kurang mampu, tetapi juga merupakan investasi makroekonomi dalam pembentukan modal manusia. Peningkatan tingkat kelulusan mahasiswa penerima KIP di dapat dilihat sebagai indikator keberhasilan kebijakan ini dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan (Ahmed et al., 2022).

Negara-negara seperti Jerman, Finlandia, dan Norwegia telah menerapkan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi berbasis subsidi publik yang mencakup pembebasan biaya kuliah serta dukungan beasiswa untuk kebutuhan hidup mahasiswa. Kebijakan tersebut terbukti efektif dalam mengurangi hambatan ekonomi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus meningkatkan tingkat kelulusan dan keberhasilan akademik secara signifikan (Berlanga & Franciele, 2025). Pendekatan ini mencerminkan strategi kebijakan publik yang menempatkan akses, kesetaraan, dan inklusi sosial sebagai pilar utama dalam pembangunan pendidikan tinggi (Arino, 2009; Cabrera et al., 2012; Alegre et al., 2017). Dalam konteks Indonesia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi bentuk nyata upaya serupa yang diterapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari bahwa ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang untuk menjawab masalah ini adalah penyediaan program beasiswa pendidikan. Akhtar et al. (2024) dalam penelitiannya "*Navigating New Horizons: The Significance of Scholarships in a Globalized World*" menegaskan bahwa di luar capaian akademik individu, program beasiswa juga memberikan dampak sosial yang lebih luas, seperti mendorong mobilitas sosial, meningkatkan potensi pembangunan ekonomi, dan memacu inovasi. Di Indonesia sendiri, beasiswa pendidikan diwujudkan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang terbagi menjadi KIP Sekolah untuk siswa sekolah dan KIP Kuliah untuk mahasiswa perguruan tinggi.

Secara teoritis, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejalan dengan *Human Capital Theory* yang diperkenalkan oleh Gary Becker (1993), yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pelaksanaan KIP, khususnya KIP Kuliah, diharapkan dapat mendorong peningkatan angka kelulusan mahasiswa sebagai salah satu indikator keberhasilan kebijakan pendidikan. Hal ini sekaligus berkorelasi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kelompok usia muda. Berdasarkan data BPS (2023), TPT untuk kelompok usia 15–24 tahun di Indonesia tercatat menurun dari 19,49% pada 2021 menjadi 17,39% pada 2023, salah satunya didorong oleh meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi melalui program KIP Kuliah.

Hal ini menunjukkan bahwa program KIP Kuliah tidak hanya berperan dalam membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi hingga tuntas, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dengan memperpanjang masa studi mereka di jalur pendidikan formal dan menunda potensi masuknya tenaga kerja tanpa keterampilan ke pasar kerja. Dengan demikian, KIP berkontribusi dalam mengurangi risiko pengangguran tidak produktif di kalangan lulusan muda (BPS, 2023). Dalam jangka panjang, akses pendidikan tinggi yang diperluas melalui KIP diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional. World Bank (2020) juga mencatat bahwa setiap peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sebesar satu tahun dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,37 poin persentase per tahun. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan beasiswa, termasuk keberhasilan kelulusan mahasiswa tepat waktu, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 3 November 2014 sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama untuk jenjang Madrasah dan Pesantren, jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat lebih dari 19 juta siswa jenjang pendidikan dasar hingga menengah telah menerima manfaat program ini. Hingga tahun 2023, jumlah penerima KIP mencapai 18,1 juta siswa dengan total penyaluran dana sekitar Rp 9,62 triliun, dan pada tahun 2024 ditargetkan menjangkau 20,8 juta siswa, dengan realisasi per Agustus sebesar 11,6 juta penerima. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi

Jambi dan LLDIKTI Wilayah X, jumlah penerima KIP Sekolah dan KIP Kuliah terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 12.000 siswa di Kota Jambi menerima KIP Sekolah, sedangkan penerima KIP Kuliah mencapai sekitar 3.800 mahasiswa, tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dalam konteks ini, KIP diharapkan dapat berperan sebagai jembatan untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun, efektivitas program ini, khususnya dalam mendukung mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu, masih perlu diuji secara empiris. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat cenderung memandang KIP hanya sebagai bantuan finansial jangka pendek, bukan sebagai instrumen yang mendorong mobilitas sosial melalui capaian akademik yang optimal. Penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa efektivitas program beasiswa seringkali terhambat oleh persepsi penerima yang memandang bantuan hanya sebagai *subsidi biaya hidup* (Oketch et al., 2014; Ayalew et al., 2023). Di Indonesia, studi semacam ini masih dominan pada skala nasional seperti *evaluasi akses mahasiswa ke perguruan tinggi melalui beasiswa, bukan pada kelulusan sebagai outcome akhir* (Suryadarma & Suryahadi, 2020; Sa'adah, et al, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan tingkat kelulusan mahasiswa penerima KIP, terutama di perguruan tinggi di Kota Jambi, menjadi penting untuk dirumuskan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.

Namun demikian, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauhmana program beasiswa KIP Kuliah benar-benar efektif dalam memengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi swasta Kota Jambi. Meskipun secara umum beasiswa diyakini dapat meningkatkan motivasi belajar dan fokus akademik mahasiswa, kenyataannya tidak semua penerima KIP mampu menyelesaikan studi mereka tepat waktu. Berbagai faktor lain seperti kesiapan akademik, dukungan lingkungan belajar, hingga tekanan sosial-ekonomi seringkali tetap menjadi hambatan meskipun bantuan finansial telah diterima. Di Perguruan Tinggi swasta Kota Jambi, program KIP telah diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir, tetapi kajian akademik yang secara khusus menelaah keterkaitan antara penerimaan beasiswa KIP dengan capaian kelulusan mahasiswa baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengukur sejauhmana program KIP Kuliah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan angka kelulusan mahasiswa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan akademik para penerima beasiswa di tingkat lokal. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah mahasiswa penerima KIP terbukti memiliki tingkat kelulusan yang lebih baik dibandingkan mahasiswa non-penerima, serta sejauh mana beasiswa ini berkontribusi dalam membuka akses yang setara terhadap peluang kerja setelah kelulusan.

Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis penyaluran KIP, tetapi juga secara mendalam menelaah dampak nyatanya terhadap dimensi pendidikan dan sosial-ekonomi mahasiswa penerima, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi kuliah, kelancaran studi, prestasi akademik, serta motivasi belajar dan perencanaan masa depan mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengangkat narasi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi mahasiswa penerima KIP secara kualitatif, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif, manusiawi, dan kontekstual terhadap efektivitas program beasiswa ini, yang selama ini lebih sering dievaluasi secara administratif dan kuantitatif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model evaluasi kebijakan berbasis bukti di tingkat lokal, yang relevan untuk direplikasi atau diadaptasi oleh pemerintah daerah maupun perguruan tinggi lain dalam merancang program intervensi pendidikan yang responsif berbasis data mikro dan kebutuhan riil mahasiswa.

Secara umum, beasiswa pendidikan merupakan bentuk transfer fiskal pemerintah untuk meningkatkan akses, partisipasi, dan penyelesaian studi mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan. Beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Indonesia memiliki karakteristik *means-tested*, artinya diberikan berdasarkan kriteria ekonomi tertentu agar tepat sasaran. Lebih lanjut, beasiswa pendidikan juga dapat dipahami sebagai bantuan finansial yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu yang pada umumnya prestasi akademik dan kondisi sosial ekonomi untuk mendukung keberlanjutan studi mereka (OECD, 2021). Beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial tetapi juga sebagai mekanisme intervensi kebijakan sosial yang bertujuan memperkecil kesenjangan akses pendidikan.

Menurut Berlanga & Franciele (2025), beasiswa publik tidak hanya memfasilitasi pembiayaan langsung, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan pendorong mobilitas sosial. Cabrera, et al (2012) dalam *The Journal of Higher Education* menekankan bahwa *student support services* seperti bimbingan akademik dan konseling karier mempengaruhi keberhasilan beasiswa dalam meningkatkan *retention* dan *completion rates*. Selain itu, Alegre, et al. (2017) melalui studi di Spanyol menemukan *positive correlation* antara *need-based grants* dengan angka penyelesaian studi di universitas negeri maupun swasta, tetapi risiko putus kuliah tetap tinggi jika beasiswa tidak dibarengi dengan *student engagement*.

Dynarski (2018) di *Review of Economics and Statistics* menunjukkan beasiswa bersifat *predictor* kelulusan bila nominal mencukupi untuk menutup gap biaya hidup mahasiswa miskin. Dalam riset *Comparative Education Review*, Berlanga & Franciele (2025) menyoroti bahwa negara-negara Eropa Utara seperti Finlandia dan Norwegia memiliki *model tuition waivers and stipends* yang tidak hanya membebaskan biaya kuliah, tetapi juga memberikan tunjangan hidup yang memadai. Kebijakan ini terbukti menurunkan angka drop out secara signifikan di universitas swasta berbiaya sedang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Campbell & Pederson (2001), penelitian kualitatif deskriptif difokuskan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” fenomena terjadi melalui penggalan data lapangan secara intensif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena secara naturalistik. Adapun indikator analisis merujuk pada Berlanga & Franciele (2025) terkait akses finansial, kesiapan akademik, dukungan sosial, dan tingkat kelulusan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria relevansi, keterjangkauan, dan pengetahuan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Campbell, 2001) dimana meliputi mahasiswa penerima KIP kuliah aktif dan telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Sementara, proses pengumpulan data dilakukan secara iteratif, menyesuaikan prinsip Campbell (2001) bahwa data kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai konteks temuan lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akses Finansial sebagai Faktor Utama**

Akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan utama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, terutama di Universitas Swasta Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah, ditemukan bahwa akses finansial merupakan determinan utama yang sangat memengaruhi kelancaran studi dan kelulusan mahasiswa. AR (21) seorang mahasiswa semester 6, menyatakan: “*Sebelum dapat KIP Kuliah, saya sempat hampir mengundurkan diri. Orang tua saya hanya buruh harian. Sekarang paling tidak saya tidak mikirin biaya kuliah lagi, tinggal fokus ke tugas dan skripsi.*”. MA (23), mahasiswa yang baru menyelesaikan skripsi, mengungkapkan: “*Tanpa KIP, mungkin saya sudah*

*kerja dari semester empat. Karena bantuan ini cukup untuk biaya kuliah dan sedikit untuk transportasi, saya bisa lanjut kuliah tanpa harus kerja sambil yang berat.”.* Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun KIP membuka akses awal, komponen kebutuhan akademik non-SPP juga perlu diperhatikan, karena sebagian besar responden juga mengakui bahwa bantuan KIP tidak hanya digunakan untuk membayar SPP, tetapi juga membantu kebutuhan penunjang belajar, seperti paket internet untuk perkuliahan daring, transportasi ke kampus, dan biaya penyusunan skripsi.

Temuan ini sejalan dengan temuan Berlanga & Franciele (2025) yang menekankan bahwa keberadaan skema pendanaan publik dapat menurunkan hambatan masuk bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, di lapangan terungkap beberapa kendala administratif, seperti keterlambatan pencairan dana, mekanisme verifikasi ulang yang memakan waktu, hingga minimnya informasi yang jelas terkait prosedur administrasi beasiswa di tingkat fakultas. Dimana, hal ini mengindikasikan bahwa program KIP Kuliah di Universitas Swasta Kota Jambi pada dasarnya telah berhasil membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa akses finansial melalui KIP belum sepenuhnya diikuti dengan jaminan stabilitas dukungan keuangan yang konsisten sepanjang masa studi.

Secara praktis, ketidakstabilan dukungan keuangan ini berdampak pada konsistensi belajar mahasiswa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan alternatif. Beberapa mahasiswa terpaksa harus bekerja paruh waktu atau mengambil pekerjaan informal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya akademik lainnya di luar UKT. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi fokus belajar, penurunan motivasi, serta memperbesar risiko keterlambatan masa studi. Oleh karena itu, interpretasi ini menegaskan perlunya evaluasi ulang mekanisme penyaluran, prosedur administrasi, serta penguatan fungsi pembinaan di tingkat universitas. Langkah ini penting agar KIP tidak hanya menjadi instrumen subsidi biaya, tetapi benar-benar efektif sebagai strategi peningkatan daya tahan akademik, penjamin kelulusan, dan sarana mobilitas sosial bagi mahasiswa di Kota Jambi.

## **2. Kesiapan Akademik Penerima Beasiswa**

Temuan berikutnya menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam hal kesiapan akademik. Mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih terarah sejak awal semester. Sebaliknya, sebagian mahasiswa memaknai KIP hanya sebagai keringanan biaya, tanpa menjadikannya insentif untuk meningkatkan capaian akademik secara optimal. IP (22) mahasiswa semester 8 yang berhasil mempertahankan IPK di atas 3,52 meskipun berasal dari keluarga prasejahtera. *“Saya merasa ada tanggung jawab moral, karena sudah dapat beasiswa. IPK saya semester ini 3,58. Saya rajin ikut bimbingan akademik dengan dosen,”.* Namun, berbanding terbalik dengan NM (23) mahasiswa semester 8 justru merasa kesiapan akademiknya menurun karena kurang disiplin manajemen waktu. *“IPK saya sempat di 3,0, tapi sekarang 2,67. Saya sempat cuti kuliah karena ada masalah keluarga. Jadi target lulus tepat waktu agak sulit kalau nggak ada motivasi tambahan,”*

Hal ini sejalan dengan Berlanga & Franciele (2025) yang menekankan bahwa kebijakan beasiswa harus diimbangi dengan strategi peningkatan kesiapan akademik agar beasiswa tidak hanya berhenti sebagai “bantuan finansial jangka pendek”. Temuan ini mempertegas bahwa akses pembiayaan semata tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pendampingan akademik yang berkelanjutan. Sebagian mahasiswa penerima KIP memang berhasil mempertahankan IPK di atas rata-rata, namun terdapat pula kelompok mahasiswa yang justru terjebak dalam zona aman hanya karena merasa terbantu secara finansial. Mereka cenderung memandang KIP sebatas subsidi biaya, bukan insentif untuk meningkatkan performa akademik dan meraih kelulusan tepat waktu.

Dalam konteks Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi, interpretasi ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dimana kebijakan KIP Kuliah perlu diintegrasikan dengan strategi pendampingan berbasis unit layanan beasiswa, dosen wali, atau tutor sebaya. Pendampingan tersebut tidak hanya sebatas aspek administrative seperti verifikasi data dan pencairan dana, tetapi harus berfokus pada pembinaan kapasitas akademik, keterampilan belajar, serta penguatan mental mahasiswa penerima manfaat agar memiliki ketahanan belajar di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Selain itu, pendampingan akademik yang berkelanjutan berperan sebagai jembatan antara bantuan finansial dan *output* keberhasilan mahasiswa. Tanpa dukungan yang sistematis, potensi terjadinya drop out tersembunyi atau keterlambatan studi akan tetap tinggi, meskipun beasiswa disalurkan secara rutin. Artinya, perlu ada kolaborasi yang lebih intensif antara pihak kampus, pemerintah daerah, dan unit pengelola KIP Kuliah dalam merumuskan kebijakan pendampingan yang kontekstual dengan karakteristik mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Sehingga, kebijakan afirmasi semacam KIP harus dipandang sebagai instrumen mobilitas sosial yang terpadu, tidak hanya berupa bantuan finansial jangka pendek.

### **3. Dukungan Sosial dan Lingkungan Kampus**

Pada beberapa Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi, sebagian mahasiswa menyebutkan adanya pembinaan rutin melalui unit pelayanan beasiswa, namun intensitasnya belum merata di semua fakultas. Beberapa mahasiswa mengaku merasa kurang memiliki mentor atau pembimbing akademik yang mendampingi mereka secara personal. AS (21), mahasiswa semester 6, menyampaikan bahwa *"Beasiswa KIP ini memang sangat membantu, apalagi untuk biaya kuliah. Tapi kalau di kampus sendiri nggak ada pendampingan akademik yang rutin, kadang saya bingung harus menyelesaikan tugas akhir bagaimana. Teman-teman yang sama-sama penerima beasiswa juga sering cerita kalau dosennya susah dihubungi."* MA (22), mahasiswa semester akhir mengatakan, *"Kalau ada dosen wali atau pembimbing yang peduli, kita bisa diarahkan biar skripsi nggak molor. Tapi kalau nggak ada kontrol sama sekali, banyak teman saya yang akhirnya mundur kelulusannya. Bantuan KIP nggak cukup kalau motivasi dan arahan nggak ada."* Selain itu, SR (20), mahasiswa semester 5, menuturkan, *"Kadang merasa minder juga, karena rata-rata penerima KIP berasal dari keluarga pas-pasan. Tapi untungnya saya punya teman satu kos yang saling dukung. Kalau nggak ada teman curhat, mungkin stres sendiri karena beban akademik."*

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun program KIP Kuliah secara nyata mampu membuka akses ke perguruan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, keberlanjutan manfaatnya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu poin kunci adalah belum terbangunnya integrasi yang solid antara aspek bantuan finansial dengan program pendampingan sosial dan akademik di tingkat institusi. Penelitian ini pada akhirnya mengkonfirmasi atau mengeneralisasi dari penelitian yang dilakukan oleh Berlanga & Franciele (2025) yang juga menyoroti pentingnya faktor dukungan sosial dalam memaksimalkan efek beasiswa terhadap kelulusan.

Lebih lanjut, sebagian mahasiswa penerima KIP menyatakan bahwa setelah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan, pendampingan lebih banyak bersifat administratif seperti verifikasi data dan pelaporan penggunaan dana. Dengan kata lain, Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi, belum memiliki keterhubungan antara beasiswa dengan program pendukung non-finansial berpotensi menurunkan efektivitas KIP sebagai instrumen kebijakan afirmatif. Jika mahasiswa penerima KIP masih harus berjuang sendiri menghadapi tekanan akademik maupun persoalan ekonomi keluarga yang muncul di tengah masa studi, risiko penundaan kelulusan akan tetap tinggi. Dengan demikian, interpretasi ini menegaskan bahwa agar kebijakan beasiswa KIP Kuliah benar-benar berkontribusi pada capaian kelulusan tepat waktu, maka diperlukan pembenahan di tingkat kelembagaan. Perguruan tinggi perlu merancang pendampingan sosial-akademik yang

terstruktur, misalnya melalui program tutorial, kelompok belajar, konseling psikososial, dan pembinaan keterampilan kerja. Dengan strategi tersebut, diharapkan tujuan kebijakan pemerintah dalam menekan ketimpangan akses pendidikan sekaligus mendorong mobilitas sosial dapat tercapai lebih optimal pada Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi.

#### **4. Tingkat Kelulusan sebagai Capaian Akhir**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa yang gagal lulus tepat waktu umumnya terhambat oleh faktor ekonomi tambahan di luar pembiayaan kuliah (seperti kebutuhan keluarga) atau keterbatasan motivasi belajar. Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan ideal KIP Kuliah dengan capaian riil di lapangan. Sebagian mahasiswa memaknai KIP hanya sebatas sebagai bantuan biaya, bukan sebagai insentif untuk meningkatkan performa akademik secara optimal. Akibatnya, beberapa penerima manfaat menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjaga IPK atau tidak mampu menyelesaikan studi tepat waktu karena faktor non-finansial lain, seperti motivasi belajar yang rendah, manajemen waktu yang buruk, dan kurangnya dukungan sosial akademik.

RZ (22), mahasiswa semester 8 menyampaikan bahwa bantuan KIP membantunya menyelesaikan pembayaran biaya kuliah tepat waktu sehingga ia tidak perlu menunggak semester. Namun demikian, RZ mengakui masih kesulitan membagi waktu antara kuliah dan kerja paruh waktu yang dilakukannya untuk menutupi kebutuhan hidup harian. *“Kalau soal bayar kuliah aman, karena KIP. Tapi biaya kos, makan, fotokopi tugas tetap harus kerja sampingan. Kadang jadi molor ngerjain skripsi,”* Lain halnya dengan ML (21), mahasiswi semester 6 dengan keberadaan KIP membuatnya termotivasi untuk mempertahankan IPK minimal agar tetap layak menerima bantuan. *“Kalau nggak jaga IPK, takut dicabut bantuannya. Jadi mau nggak mau harus rajin biar bisa cepet lulus,”* ujar ML. Meski demikian, ia juga berharap kampus memberikan bimbingan akademik yang lebih intensif agar kendala penulisan tugas akhir bisa teratasi. Sementara itu, DF (23), mahasiswa semester akhir, mengungkapkan tantangan lain: ketidaksesuaian antara nominal bantuan dengan kebutuhan riil. *“Uang beasiswa nggak cukup untuk biaya riset lapangan. Makanya saya masih nunda sidang skripsi, nunggu uang tambahan,”*. Dalam konteks Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi, kebijakan beasiswa yang bersifat *input-oriented* (akses masuk) perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung pada aspek proses dan output, yaitu strategi untuk mempertahankan mahasiswa tetap aktif, produktif, dan lulus sesuai masa studi ideal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendorong adanya kebijakan lanjutan di tingkat universitas, misalnya penguatan unit layanan mahasiswa penerima KIP melalui program pendampingan intensif, pengawasan progres akademik, serta pemberian pelatihan non-akademik yang relevan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa bantuan finansial tidak hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi benar-benar mampu meningkatkan capaian kelulusan dan daya saing lulusan di pasar kerja. Secara praktis, interpretasi ini mendukung rekomendasi agar pihak Perguruan Tinggi swasta yang ada di Kota Jambi, Pemerintah Daerah, dan Kemendikbudristek dapat berkolaborasi membangun ekosistem beasiswa berbasis pembinaan, dimana indikator kelulusan, prestasi, dan kesiapan kerja menjadi tolok ukur keberhasilan program KIP di masa mendatang.

#### **SIMPULAN**

1. Mayoritas informan menyatakan bahwa beasiswa ini membantu mengurangi beban biaya UKT, kebutuhan pembelajaran, serta kebutuhan dasar penunjang studi. Namun demikian, ketergantungan pada jadwal pencairan yang tidak selalu tepat waktu masih menjadi kendala teknis yang berdampak pada pengelolaan biaya hidup mahasiswa.

2. Sebagian mahasiswa penerima KIP mampu memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan fokus belajar dan menjaga capaian IPK di atas standar minimal. Akan tetapi, sebagian lainnya masih memaknai KIP hanya sebagai bantuan keuangan jangka pendek tanpa didorong oleh motivasi akademik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa beasiswa yang bersifat *input-oriented* perlu diimbangi dengan program peningkatan kesiapan belajar, penguatan motivasi internal, serta pelatihan keterampilan belajar mandiri.
3. Layanan pendampingan bagi mahasiswa penerima KIP pada Perguruan Tinggi swasta di Kota Jambi belum merata di setiap fakultas. Sebagian mahasiswa merasa bimbingan hanya sebatas prosedur administratif, bukan pendampingan holistik yang membantu mereka mengatasi tantangan sosial dan psikologis selama studi. Padahal, dukungan sosial yang memadai dapat menjadi faktor retensi penting agar mahasiswa bertahan hingga lulus.
4. Meskipun sebagian besar mahasiswa penerima KIP berhasil lulus, angka kelulusan tepat waktu masih berada di bawah target ideal universitas. Beberapa faktor penghambat antara lain kesulitan mengatur waktu belajar, beban kerja sambilan, serta minimnya pelatihan keterampilan kerja yang relevan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan studi ini, disarankan agar kebijakan pemberian beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya difokuskan pada aspek akses dan pembiayaan, tetapi juga diperluas cakupannya ke arah peningkatan kualitas dukungan akademik dan non-akademik yang berkelanjutan bagi mahasiswa penerima. Pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi swasta untuk memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa secara berkala, termasuk penyediaan layanan pendampingan belajar, konseling karier, dan pelatihan keterampilan hidup. Dengan demikian, kebijakan beasiswa tidak hanya mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan angka kelulusan dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi yang mengalami tekanan sosial-ekonomi tinggi terhadap kelompok mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, R., Adeel A., & Waseem B. (2022). An impact evaluation of government scholarships on student success: A 59 case study of the University of Turbat. *Social Sector Development*, 4, 59-84. Published by Research for Social Transformation & Advancement (RASTA), at the Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, PAKISTAN.
- Akhtar, M.N., Sidra B, Shahbaz A.A., Kirn A., Mukarram N., Amaim Z., & Muhammad W. (2024). Navigating New Horizons: The significance of scholarships in a globalized world. *Dialogue Social Science Review (DSSR)*, 2(5), 15-42.
- Alegre, M.Á., Berlanga V., Agudo Y., & Vallès, A. (2017). Sistemas de becas y ayudas al estudio en España, Cataluña y Valencia. *La Cuestión Univers.* 9, 28-45.
- Ariño, A. (2009). La dimensión social y la innovación en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Rev. d'Innov. Educ.* 2, 2-9.
- Ayalew, M. M., Teshome, B. A., & Moges, M. (2023). Perceptions of University Students toward Government Educational Subsidies in Ethiopia. *Education and Urban Society*, 55(1), 102-123.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. Jakarta: BPS.
- Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Third edition. University of Chicago Press.



- Berlanga, V., & Franciele C. (2025). Impact of scholarships on university academic performance: A comparative analysis of students with and without scholarships. *Front. Educ*, 1-10. ArtID:1554073.
- Cabrera, A.F., Burkum K.R., LaNasa, S.M., & Bibo, E. W. (2012). Pathways to a four-year degree: Determinants of degree completion among socioeconomically disadvantaged students, in *College Student Retention: Formula for Student Success*, ed. A. Seidman (Lanham, MA: Rowman and Littlefield Publishers), 155-214.
- Campbell, J.L., & Pederson, O.K. (2001). *Designing Qualitative Research*. (Eds). Sage Publications.
- Dynarski, S. (2018). *The Impact of Student Financial Aid on College Access, Enrollment, and Graduation. Review of Economics and Statistics*, 100(2).
- OECD. (2021). *Education at a Glance 2021*. OECD Publishing.
- Oketch, M., Mutisya, M., Ngware, M., & Ezech, A. (2014). Why are there proportionately more poor pupils enrolled in non-state schools in urban Kenya in spite of FPE policy?. *International Journal of Educational Development*, 36, 87-97.
- Romer, D. (2012). *Advanced Macro Economics*. Fourth Edition. University of California, Berkeley: Mc. Graw-Hill.
- Sa'adah, N., Lestari, D.P., & Pramono, H. (2021). Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Beasiswa KIP Kuliah di PTKIN. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 123-134.
- Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). The impact of scholarships on access to higher education in Indonesia. *Asian Social Science*, 16(8), 33-45.
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. Washington, DC.